

## Pendampingan Revitalisasi Sasi sebagai Upaya Penguatan Ketahanan Sosial-Ekologis di Negeri Lima Maluku Tengah

Muhtar<sup>1</sup>, Yustina Sopacua<sup>2</sup>, Amir Faisal Kotarumalos<sup>3</sup>, Saiful Rizal Mahulauw<sup>4</sup>, Rukoyah<sup>5</sup>

Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Pattimura Ambon, Indonesia<sup>1,2,3,4,5</sup>

Email Korespodensi: [muhtar@lecturer.unpatti.ac.id](mailto:muhtar@lecturer.unpatti.ac.id)

### INFO ARTIKEL

#### Histori Artikel:

Diterima 05-05-2026

Disetujui 13-05-2026

Diterbitkan 15-05-2026

### ABSTRACT

*This community service activity entitled “Assistance for the Revitalization of Sasi as an Effort to Strengthen Social-Ecological Resilience in Negeri Lima” was conducted in Negeri Lima, Leihitu District, Central Maluku Regency. The activity was motivated by the declining implementation of sasi values, weakening community participation in coastal environmental management, and increasing social-ecological pressures caused by environmental degradation and climate change in coastal areas. The purpose of this program was to strengthen the social-ecological resilience of coastal communities through the revitalization of sasi as a local wisdom-based coastal resource management system. The implementation method used a participatory and collaborative approach involving village government, customary leaders, youth groups, women groups, and coastal communities. The stages of activities included problem identification, socialization, Focus Group Discussion (FGD), institutional strengthening assistance, and program evaluation. The results of the activity showed an increase in community understanding regarding the role of sasi as an instrument for natural resource management, social control mechanism, preservation of local cultural values, and strengthening social solidarity. Community participation in discussions and environmental awareness activities also increased significantly. In addition, stronger coordination was established between the village government and customary institutions in supporting community-based coastal management. The program also produced recommendations for strengthening customary regulations, participatory environmental monitoring, youth involvement, and local culture-based environmental education. Overall, the revitalization of sasi contributed positively to strengthening the social-ecological resilience of the coastal community in Negeri Lima and became an initial model for sustainable local wisdom-based coastal governance.*

**Keyword:** Sasi revitalization; social-ecological resilience; coastal community; local wisdom; participatory governance

**Bagaimana Cara Sitasi Artikel ini:**

Muhtar, M., Sopacua, Y. ., Kotarumalos, A. F., Mahulauw, S. R., & Rukoyah, R. (2026). Pendampingan Revitalisasi Sasi sebagai Upaya Penguatan Ketahanan Sosial-Ekologis di Negeri Lima Maluku Tengah. *Indonesia Berdampak: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2(1), 252-271. <https://doi.org/10.63822/26g3bq31>



## **PENDAHULUAN**

Negeri Lima di Kecamatan Leihitu, Kabupaten Maluku Tengah merupakan salah satu wilayah pesisir yang masih memiliki struktur sosial adat yang kuat melalui pranata negeri, soa, baileo, dan nilai-nilai kearifan lokal masyarakat. Kehidupan masyarakat Negeri Lima sangat bergantung pada sumber daya pesisir dan laut, baik sebagai ruang hidup, sumber ekonomi, maupun bagian dari identitas sosial budaya masyarakat. Sebagian besar masyarakat bekerja sebagai nelayan dan petani dengan ketergantungan tinggi terhadap keberlanjutan ekosistem pesisir dan laut.

Di tengah perubahan sosial dan tekanan lingkungan yang semakin meningkat, masyarakat pesisir Negeri Lima menghadapi berbagai tantangan seperti perubahan iklim, penurunan hasil perikanan, degradasi lingkungan pesisir, serta berkurangnya partisipasi generasi muda terhadap praktik-praktik adat lokal. Kondisi tersebut berdampak pada melemahnya ketahanan sosial-ekologis masyarakat, yaitu kemampuan masyarakat dalam menjaga keseimbangan antara keberlanjutan lingkungan dan stabilitas sosial komunitas pesisir. Penelitian terkait pemberdayaan masyarakat pesisir di Negeri Lima menunjukkan bahwa perubahan iklim telah memberikan dampak signifikan terhadap ketidakpastian hasil tangkapan ikan dan kondisi ekonomi masyarakat pesisir (Wattimena et al., 2024).

Salah satu kearifan lokal masyarakat Maluku yang sejak lama menjadi instrumen pengelolaan sumber daya alam adalah sasi. Sasi merupakan mekanisme adat yang mengatur pemanfaatan sumber daya alam melalui pembatasan waktu, ruang, maupun jenis sumber daya tertentu guna menjaga keberlanjutan ekosistem dan keseimbangan sosial masyarakat. Dalam praktiknya, sasi tidak hanya berfungsi sebagai aturan adat, tetapi juga menjadi instrumen kontrol sosial, penguatan solidaritas masyarakat, serta media pendidikan nilai-nilai kolektif antargenerasi. Namun demikian, dalam beberapa tahun terakhir, implementasi sasi di berbagai wilayah Maluku mulai mengalami pelemahan akibat modernisasi, perubahan pola ekonomi masyarakat, dan lemahnya integrasi antara pemerintahan lokal dengan kelembagaan adat.

Di Negeri Lima sendiri, keberadaan pranata adat masih tampak melalui fungsi baileo sebagai ruang musyawarah dan simbol identitas masyarakat adat. Akan tetapi, praktik pengelolaan sumber daya berbasis sasi belum sepenuhnya dioptimalkan sebagai bagian dari penguatan tata kelola sosial-ekologis masyarakat pesisir. Padahal, masyarakat Negeri Lima memiliki modal sosial yang kuat berupa hubungan pela-gandong, struktur soa, serta solidaritas komunitas yang masih terpelihara. Kondisi ini menjadi peluang strategis untuk melakukan revitalisasi sasi sebagai instrumen penguatan ketahanan masyarakat pesisir.

Beberapa kegiatan pengabdian dan pemberdayaan masyarakat sebelumnya di Negeri Lima telah menunjukkan pentingnya kolaborasi antara masyarakat, pemerintah negeri, dan lembaga pendamping dalam memperkuat kapasitas masyarakat pesisir. Program pemberdayaan perempuan yang dilakukan melalui kelompok “Mahina Hena Lima” memperlihatkan bahwa pendekatan partisipatif mampu meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam pengembangan ekonomi lokal dan penguatan kapasitas komunitas (Wattimena et al., 2024). Selain itu, penelitian mengenai persepsi masyarakat terhadap DAM Wae Ela juga menunjukkan bahwa masyarakat Negeri Lima memiliki kesadaran yang cukup tinggi terhadap pentingnya pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan dan partisipatif (Ruman & Nanlohy, 2025).

Berdasarkan kondisi tersebut, kegiatan pengabdian ini difokuskan pada pendampingan revitalisasi sasi sebagai upaya penguatan ketahanan sosial-ekologis masyarakat Negeri Lima. Kegiatan dilakukan melalui pendekatan partisipatif dengan melibatkan pemerintah negeri, tokoh adat, tokoh masyarakat, pemuda, dan kelompok masyarakat pesisir. Bentuk kegiatan meliputi identifikasi potensi dan permasalahan sosial-ekologis, diskusi kelompok terarah (FGD), sosialisasi nilai dan praktik sasi, penguatan kapasitas

kelembagaan adat dan pemerintahan negeri, serta penyusunan model pengelolaan berbasis sasi yang kontekstual dengan kondisi masyarakat Negeri Lima saat ini.

Kontribusi utama dari kegiatan ini adalah mendorong penguatan kelembagaan sosial masyarakat berbasis kearifan lokal, meningkatkan kesadaran kolektif masyarakat terhadap pelestarian lingkungan pesisir, serta memperkuat kolaborasi antara pemerintahan negeri dan lembaga adat dalam tata kelola sumber daya alam yang berkelanjutan. Selain itu, kegiatan ini diharapkan mampu menjadi model penguatan ketahanan sosial-ekologis berbasis budaya lokal yang dapat direplikasi pada wilayah pesisir lain di Maluku.

Adapun tujuan kegiatan pengabdian ini adalah:

1. Mengidentifikasi kondisi sosial-ekologis dan praktik sasi di Negeri Lima;
2. Meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai pentingnya revitalisasi sasi dalam pengelolaan sumber daya pesisir;
3. Memperkuat kapasitas pemerintah negeri dan kelembagaan adat dalam implementasi sasi;
4. Mendorong partisipasi masyarakat dalam penguatan ketahanan sosial-ekologis berbasis kearifan lokal;
5. Menyusun model pendampingan revitalisasi sasi yang adaptif dan berkelanjutan di Negeri Lima

## **METODE PELAKSANAAN**

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan di Negeri Lima, Kecamatan Leihitu, Kabupaten Maluku Tengah dengan fokus pada pendampingan revitalisasi sasi sebagai upaya penguatan ketahanan sosial-ekologis masyarakat pesisir. Metode pelaksanaan menggunakan pendekatan partisipatif dan kolaboratif dengan melibatkan pemerintah negeri, tokoh adat, tokoh masyarakat, pemuda, kelompok perempuan, serta masyarakat pesisir sebagai subjek utama kegiatan. Pendekatan ini dipilih agar proses pengabdian tidak hanya bersifat sosialisasi, tetapi juga mendorong keterlibatan aktif masyarakat dalam penguatan kembali praktik sasi sebagai bagian dari tata kelola sosial dan lingkungan.

Pelaksanaan kegiatan dibagi menjadi tiga tahapan utama, yaitu tahap pra pelaksanaan, tahap pelaksanaan, dan tahap evaluasi.

### **A. Pra Pelaksanaan**

Tahap pra pelaksanaan merupakan tahap persiapan awal untuk memastikan kegiatan pengabdian berjalan sesuai dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat Negeri Lima. Kegiatan pada tahap ini meliputi:

1. Observasi Awal dan Identifikasi Masalah. Tim pengabdian melakukan observasi lapangan untuk mengidentifikasi kondisi sosial-ekologis masyarakat pesisir, bentuk praktik sasi yang masih berjalan, serta tantangan yang dihadapi masyarakat dalam pengelolaan sumber daya pesisir. Observasi dilakukan melalui pengamatan langsung dan komunikasi awal dengan pemerintah negeri, tokoh adat, dan masyarakat.
2. Koordinasi dengan Pemerintah Negeri dan Lembaga Adat. Koordinasi dilakukan dengan Pemerintah Negeri Lima, tokoh adat, dan unsur masyarakat untuk memperoleh dukungan pelaksanaan kegiatan sekaligus membangun kesepahaman mengenai tujuan dan manfaat program pengabdian. Pada tahap ini juga dilakukan penentuan jadwal kegiatan, lokasi pelaksanaan, dan kelompok sasaran kegiatan.
3. Penyusunan Instrumen dan Materi Pendampingan. Tim menyusun materi sosialisasi, panduan diskusi, serta instrumen wawancara dan dokumentasi yang digunakan dalam kegiatan pendampingan. Materi yang disiapkan berfokus pada revitalisasi sasi, penguatan ketahanan sosial-ekologis, pengelolaan

sumber daya pesisir berbasis kearifan lokal, dan penguatan tata kelola pemerintahan negeri berbasis partisipasi masyarakat.

## **B. Pelaksanaan**

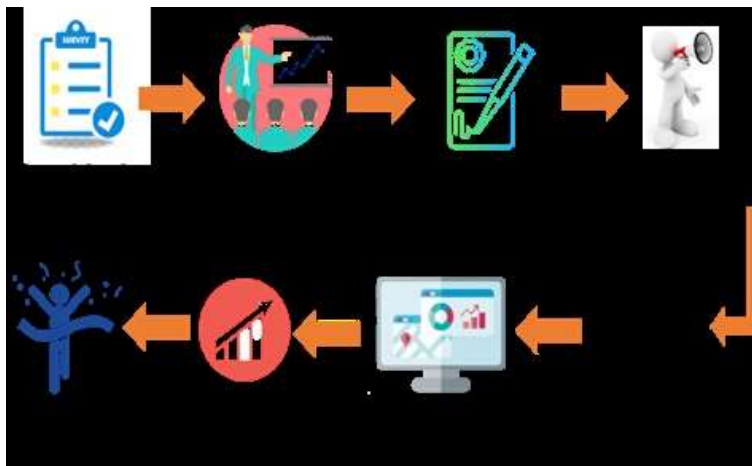
Tahap pelaksanaan merupakan inti kegiatan pengabdian yang dilakukan secara partisipatif melalui beberapa metode kegiatan sebagai berikut:

1. Sosialisasi dan Edukasi Revitalisasi Sasi. Kegiatan sosialisasi dilakukan kepada masyarakat untuk meningkatkan pemahaman mengenai pentingnya sasi sebagai kearifan lokal dalam menjaga keberlanjutan lingkungan pesisir dan memperkuat solidaritas sosial masyarakat. Materi disampaikan melalui diskusi interaktif, pemaparan, dan dialog bersama tokoh adat serta pemerintah negeri.
2. *Focus Group Discussion* (FGD). FGD dilakukan dengan melibatkan tokoh adat, pemerintah negeri, kelompok perempuan, pemuda, dan masyarakat pesisir untuk menggali:
  - a) bentuk praktik sasi yang masih dijalankan;
  - b) permasalahan sosial dan lingkungan yang dihadapi masyarakat;
  - c) potensi penguatan kelembagaan adat;
  - d) strategi revitalisasi sasi yang sesuai dengan kondisi masyarakat Negeri Lima.

Melalui FGD, masyarakat diberikan ruang untuk menyampaikan pandangan dan pengalaman secara langsung sehingga diperoleh model pendampingan yang berbasis kebutuhan masyarakat.

3. Pendampingan Kelembagaan Adat dan Pemerintahan Negeri. Tim pengabdian melakukan pendampingan kepada pemerintah negeri dan lembaga adat dalam penguatan tata kelola berbasis sasi. Pendampingan meliputi:
  - a) penguatan peran tokoh adat dalam pengawasan sumber daya pesisir;
  - b) penguatan koordinasi antara pemerintah negeri dan lembaga adat;
  - c) penyusunan mekanisme partisipatif pengelolaan sumber daya pesisir berbasis sasi;
  - d) penguatan peran masyarakat dalam pengawasan lingkungan.
4. Penyusunan Rencana Tindak Lanjut. Bersama masyarakat dan pemerintah negeri, tim menyusun rekomendasi dan rencana tindak lanjut revitalisasi sasi yang dapat diterapkan secara berkelanjutan. Rencana tindak lanjut disusun berdasarkan hasil diskusi dan kebutuhan masyarakat setempat.

Tahapan Pelaksanaan Pengabdian



**Gambar 1.** Tahapan pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat

### Tahapan Kegiatan PKM



**Gambar 2.** Tahapan kegiatan pendampingan dan koordinasi program pengabdian

### C. Evaluasi

Tahap evaluasi dilakukan untuk menilai efektivitas kegiatan pengabdian serta tingkat partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan program. Evaluasi dilakukan melalui:

1. Evaluasi Proses. Evaluasi proses dilakukan selama kegiatan berlangsung dengan melihat tingkat keterlibatan masyarakat, keaktifan peserta dalam diskusi, serta ketercapaian setiap tahapan kegiatan pengabdian.
2. Evaluasi Hasil. Evaluasi hasil dilakukan dengan mengukur:
  - a) peningkatan pemahaman masyarakat mengenai sasi dan ketahanan sosial-ekologis;
  - b) peningkatan koordinasi antara pemerintah negeri dan lembaga adat;
  - c) tersusunnya rekomendasi revitalisasi sasi berbasis partisipasi masyarakat;
  - d) meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap pelestarian lingkungan pesisir.
4. Dokumentasi dan Pelaporan. Seluruh kegiatan didokumentasikan dalam bentuk foto, catatan lapangan, dan laporan hasil pengabdian. Hasil evaluasi menjadi dasar penyusunan laporan akhir sekaligus rekomendasi pengembangan program pengabdian lanjutan di Negeri Lima.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dengan tema *Pendampingan Revitalisasi Sasi sebagai Upaya Penguatan Ketahanan Sosial-Ekologis di Negeri Lima* dilaksanakan melalui pendekatan partisipatif dengan melibatkan pemerintah negeri, tokoh adat, kelompok masyarakat, pemuda, dan masyarakat pesisir. Kegiatan ini difokuskan pada penguatan kembali praktik sasi sebagai instrumen sosial-ekologis dalam menjaga keberlanjutan sumber daya pesisir sekaligus memperkuat solidaritas sosial masyarakat Negeri Lima. Pendekatan partisipatif dipilih karena revitalisasi kearifan lokal tidak dapat dilakukan secara top-down, melainkan harus melibatkan masyarakat sebagai aktor utama dalam proses pengelolaan sumber daya alam berbasis budaya lokal.

Pelaksanaan kegiatan dilakukan secara bertahap mulai dari identifikasi masalah, penyusunan program pendampingan, sosialisasi, diskusi kelompok, hingga evaluasi kegiatan bersama masyarakat dan pemerintah negeri. Tahapan kegiatan pengabdian ditunjukkan pada Gambar 1 dan Gambar 2. Kegiatan ini

juga mengintegrasikan pendekatan *community based development* dan penguatan kelembagaan lokal sebagai strategi membangun ketahanan sosial-ekologis masyarakat pesisir secara berkelanjutan.

Beberapa kegiatan pengabdian terdahulu menunjukkan bahwa penguatan kelembagaan adat dan partisipasi masyarakat menjadi faktor penting dalam keberhasilan pengelolaan wilayah pesisir berbasis kearifan lokal. Pengabdian yang dilakukan oleh Wattimena et al. (2024) di Negeri Lima menunjukkan bahwa kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan lembaga pendamping mampu meningkatkan kapasitas masyarakat pesisir dalam menghadapi tekanan perubahan iklim dan ketidakpastian ekonomi masyarakat nelayan. Selain itu, penelitian terbaru mengenai persepsi masyarakat terhadap DAM Wae Ela menunjukkan bahwa masyarakat Negeri Lima memiliki kesadaran yang cukup tinggi terhadap pentingnya pengelolaan sumber daya alam secara partisipatif dan berkelanjutan (Ruman & Nanlohy, 2025). Temuan tersebut menjadi dasar penting dalam pelaksanaan pendampingan revitalisasi sasi sebagai instrumen penguatan ketahanan sosial-ekologis masyarakat pesisir.

### **A. Identifikasi Permasalahan Sosial-Ekologis**

Tahap awal kegiatan dilakukan melalui observasi lapangan dan diskusi bersama pemerintah negeri, tokoh adat, dan masyarakat pesisir. Observasi dilakukan untuk mengidentifikasi kondisi sosial masyarakat, praktik sasi yang masih berjalan, pola pemanfaatan sumber daya pesisir, serta tantangan lingkungan yang dihadapi masyarakat Negeri Lima. Selain observasi, tim pengabdian juga melakukan komunikasi awal dengan tokoh adat dan pemerintah negeri untuk memperoleh gambaran mengenai dinamika sosial masyarakat serta kondisi kelembagaan adat di wilayah tersebut.

Berdasarkan hasil identifikasi, ditemukan beberapa permasalahan utama yang mempengaruhi ketahanan sosial-ekologis masyarakat Negeri Lima, yaitu:

1. Menurunnya praktik dan pemahaman generasi muda terhadap nilai-nilai sasi;
2. Belum optimalnya integrasi kelembagaan adat dan pemerintah negeri dalam pengelolaan sumber daya pesisir;
3. Meningkatnya tekanan terhadap sumber daya laut akibat perubahan pola pemanfaatan;
4. Rendahnya partisipasi masyarakat dalam pengawasan lingkungan pesisir secara kolektif;
5. Ancaman perubahan iklim dan kerusakan lingkungan pesisir yang mulai mempengaruhi kehidupan ekonomi masyarakat.

Permasalahan tersebut menunjukkan adanya perubahan sosial yang mulai mempengaruhi keberlanjutan praktik-praktik adat masyarakat pesisir. Generasi muda cenderung memiliki keterlibatan yang lebih rendah terhadap kegiatan adat dibandingkan generasi sebelumnya. Kondisi ini menyebabkan nilai-nilai kolektif yang sebelumnya menjadi dasar pengelolaan sumber daya berbasis adat mulai mengalami pelemahan. Dalam konteks masyarakat pesisir, melemahnya praktik sasi dapat berdampak pada meningkatnya eksploitasi sumber daya laut dan menurunnya efektivitas kontrol sosial masyarakat terhadap lingkungan pesisir.

Selain itu, integrasi antara pemerintah negeri dan kelembagaan adat dalam pengelolaan wilayah pesisir masih belum berjalan secara optimal. Kelembagaan adat masih memiliki legitimasi sosial yang kuat di masyarakat, namun belum sepenuhnya didukung melalui mekanisme koordinasi yang terstruktur dengan pemerintah negeri. Akibatnya, pengelolaan sumber daya pesisir masih berjalan secara parsial dan belum memiliki sistem pengawasan berbasis masyarakat yang kuat.

Tekanan terhadap sumber daya laut juga semakin meningkat akibat perubahan pola pemanfaatan wilayah pesisir dan meningkatnya kebutuhan ekonomi masyarakat. Sebagian masyarakat mulai

menyampaikan kekhawatiran terhadap menurunnya kualitas lingkungan pesisir dan hasil tangkapan laut yang tidak menentu. Kondisi tersebut diperkuat oleh ancaman perubahan iklim yang mulai dirasakan masyarakat melalui perubahan musim, ketidakpastian cuaca, dan gangguan terhadap aktivitas perikanan masyarakat pesisir.

Kondisi tersebut sejalan dengan hasil penelitian sebelumnya yang menunjukkan bahwa masyarakat pesisir Negeri Lima menghadapi tekanan sosial dan ekonomi akibat perubahan iklim dan ketidakpastian hasil perikanan (Wattimena et al., 2024). Penelitian tersebut juga menegaskan bahwa masyarakat pesisir membutuhkan penguatan kapasitas sosial dan kelembagaan lokal agar mampu beradaptasi terhadap perubahan lingkungan dan tekanan ekonomi masyarakat pesisir.

Selain itu, penelitian pengabdian masyarakat berbasis kearifan lokal di wilayah pesisir Maluku menunjukkan bahwa penguatan kelembagaan adat mampu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan lingkungan dan memperkuat solidaritas sosial komunitas pesisir. Pendekatan berbasis budaya lokal dinilai lebih efektif karena masyarakat memiliki kedekatan sosial dan emosional terhadap nilai-nilai adat yang diwariskan secara turun-temurun. Oleh karena itu, revitalisasi sasi dipandang sebagai strategi yang relevan dalam membangun ketahanan sosial-ekologis masyarakat Negeri Lima.

Meskipun menghadapi berbagai tantangan sosial dan lingkungan, masyarakat Negeri Lima masih memiliki modal sosial yang kuat berupa hubungan adat, struktur soa, dan nilai kolektivitas masyarakat yang berpotensi menjadi dasar penguatan kembali praktik sasi. Struktur sosial adat yang masih bertahan dalam kehidupan masyarakat menjadi faktor penting dalam mendukung keberhasilan revitalisasi sasi sebagai bagian dari tata kelola wilayah pesisir berbasis masyarakat. Selain itu, keberadaan baileo sebagai ruang musyawarah adat masih berfungsi sebagai simbol identitas sosial dan ruang kolektif masyarakat dalam menyelesaikan persoalan bersama.

Hasil identifikasi permasalahan ini menjadi dasar dalam penyusunan program pendampingan revitalisasi sasi yang difokuskan pada penguatan kelembagaan adat, peningkatan partisipasi masyarakat, penguatan edukasi lingkungan berbasis budaya lokal, serta pengembangan tata kelola pesisir yang partisipatif dan berkelanjutan.

## **B. Pelaksanaan Pendampingan Revitalisasi Sasi kepada Masyarakat**

Kegiatan pendampingan revitalisasi sasi dilaksanakan melalui pendekatan partisipatif yang menempatkan masyarakat sebagai aktor utama dalam proses penguatan kembali nilai-nilai adat dan pengelolaan sumber daya pesisir berbasis kearifan lokal. Pendekatan partisipatif dipilih karena pengelolaan sumber daya alam yang melibatkan masyarakat secara aktif dinilai lebih efektif dalam membangun rasa memiliki (*sense of belonging*) dan tanggung jawab kolektif terhadap lingkungan. Dalam konteks masyarakat pesisir Maluku, sasi tidak hanya dipahami sebagai aturan adat semata, tetapi juga sebagai mekanisme sosial yang mengatur hubungan manusia dengan lingkungan serta menjaga keseimbangan sosial masyarakat.

Pelaksanaan pendampingan revitalisasi sasi dilakukan melalui beberapa bentuk kegiatan utama, yaitu sosialisasi, *Focus Group Discussion* (FGD), dan pendampingan kelembagaan adat serta pemerintah negeri. Kegiatan tersebut bertujuan untuk membangun kembali kesadaran masyarakat mengenai pentingnya sasi dalam mendukung ketahanan sosial-ekologis masyarakat Negeri Lima.

### **1. Sosialisasi Revitalisasi Sasi**

Kegiatan sosialisasi dilakukan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai pentingnya sasi dalam menjaga keberlanjutan sumber daya pesisir dan memperkuat ketahanan sosial masyarakat. Materi sosialisasi mencakup:

- a) fungsi sasi dalam pengelolaan sumber daya alam;
- b) peran kelembagaan adat dalam pengawasan lingkungan;
- c) pentingnya partisipasi masyarakat dalam menjaga wilayah pesisir;
- d) penguatan kolaborasi pemerintah negeri dan masyarakat adat.

Secara teoritis, sasi merupakan bentuk *local wisdom* yang berkembang dalam masyarakat Maluku sebagai sistem pengelolaan sumber daya berbasis komunitas (*community based resource management*). Sistem ini berfungsi mengatur waktu, ruang, dan tata cara pemanfaatan sumber daya alam agar tetap berkelanjutan. Menurut konsep ketahanan sosial-ekologis (*social-ecological resilience*), suatu komunitas dikatakan memiliki ketahanan yang baik apabila mampu mempertahankan fungsi sosial dan ekologisnya dalam menghadapi tekanan perubahan lingkungan maupun sosial. Dalam konteks tersebut, revitalisasi sasi menjadi penting karena mampu memperkuat kapasitas masyarakat dalam menjaga keseimbangan antara kebutuhan ekonomi, kelestarian lingkungan, dan stabilitas sosial masyarakat pesisir.

Kegiatan sosialisasi mendapatkan respon positif dari masyarakat karena sebagian besar masyarakat masih memahami sasi sebagai bagian dari identitas budaya lokal. Keberadaan baileo sebagai ruang musyawarah adat juga menjadi media penting dalam memperkuat kembali nilai-nilai kolektif masyarakat Negeri Lima. Selain itu, masyarakat Negeri Lima masih memiliki struktur sosial adat yang kuat melalui sistem soa, hubungan pela-gandong, serta kelembagaan adat yang masih dihormati dalam kehidupan sosial masyarakat.

Dalam proses sosialisasi, masyarakat menunjukkan antusiasme yang tinggi terutama ketika membahas hubungan antara sasi dengan perlindungan sumber daya laut dan keberlanjutan mata pencaharian masyarakat pesisir. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat mulai menyadari bahwa melemahnya praktik sasi dapat berdampak pada meningkatnya tekanan terhadap sumber daya pesisir dan menurunnya solidaritas sosial masyarakat.

Temuan kegiatan ini sejalan dengan hasil pengabdian dan penelitian terdahulu yang menegaskan bahwa pendekatan berbasis kearifan lokal mampu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan lingkungan. Penelitian Wattimena et al. (2024) menunjukkan bahwa penguatan partisipasi masyarakat pesisir di Negeri Lima melalui pendekatan kolaboratif mampu meningkatkan kapasitas masyarakat dalam menghadapi tantangan sosial dan ekonomi akibat perubahan iklim. Selain itu, penelitian Ruman dan Nanlohy (2025) terkait persepsi masyarakat terhadap DAM Wae Ela menunjukkan bahwa masyarakat Negeri Lima memiliki tingkat kesadaran yang cukup tinggi terhadap pentingnya pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan dan partisipatif.

Dibandingkan dengan kegiatan sejenis, pendampingan revitalisasi sasi ini memiliki keunggulan karena tidak hanya menitikberatkan pada aspek pelestarian budaya, tetapi juga mengintegrasikan aspek ketahanan sosial-ekologis masyarakat pesisir. Melalui kegiatan sosialisasi, masyarakat tidak hanya memperoleh pengetahuan mengenai fungsi sasi, tetapi juga memahami pentingnya kolaborasi antara pemerintah negeri, lembaga adat, dan masyarakat dalam menjaga keberlanjutan lingkungan pesisir Negeri Lima

## **2. Focus Group Discussion (FGD)**

Kegiatan *Focus Group Discussion* (FGD) dilaksanakan sebagai bagian penting dalam proses pendampingan revitalisasi sasi di Negeri Lima. FGD dilakukan dengan melibatkan berbagai unsur masyarakat, yaitu tokoh adat, pemerintah negeri, pemuda, kelompok perempuan, dan masyarakat pesisir.

Pelibatan berbagai kelompok tersebut bertujuan untuk membangun komunikasi partisipatif sekaligus menggali pandangan masyarakat mengenai kondisi aktual praktik sasi dan tantangan pengelolaan sumber daya pesisir di Negeri Lima.

Metode FGD digunakan karena dinilai mampu menciptakan ruang dialog kolektif yang partisipatif dalam proses pengambilan keputusan masyarakat. Dalam pendekatan pemberdayaan masyarakat, FGD merupakan salah satu metode yang efektif untuk mengidentifikasi kebutuhan masyarakat, memetakan masalah sosial, serta merumuskan solusi bersama berdasarkan pengalaman dan kondisi lokal masyarakat. Selain itu, pendekatan partisipatif melalui diskusi kelompok dapat memperkuat hubungan sosial antar masyarakat sekaligus meningkatkan rasa tanggung jawab kolektif terhadap program yang dijalankan.

Diskusi difokuskan pada identifikasi bentuk sasi yang masih dijalankan, tantangan implementasi sasi, serta strategi revitalisasi yang dapat diterapkan sesuai kondisi sosial masyarakat saat ini. Dalam pelaksanaan FGD, masyarakat diberikan kesempatan untuk menyampaikan pengalaman, pandangan, dan harapan mereka terhadap keberlanjutan praktik sasi sebagai bagian dari tata kelola sosial-ekologis masyarakat pesisir.

Hasil diskusi menunjukkan bahwa masyarakat masih memiliki keinginan yang kuat untuk mempertahankan praktik sasi sebagai bagian dari identitas budaya dan mekanisme perlindungan sumber daya alam. Namun demikian, masyarakat juga mengakui bahwa implementasi sasi saat ini menghadapi berbagai tantangan akibat perubahan sosial, perkembangan ekonomi masyarakat, serta berkurangnya keterlibatan generasi muda dalam kegiatan adat.

Berdasarkan hasil FGD, diperoleh beberapa poin penting yang menjadi perhatian bersama, yaitu:

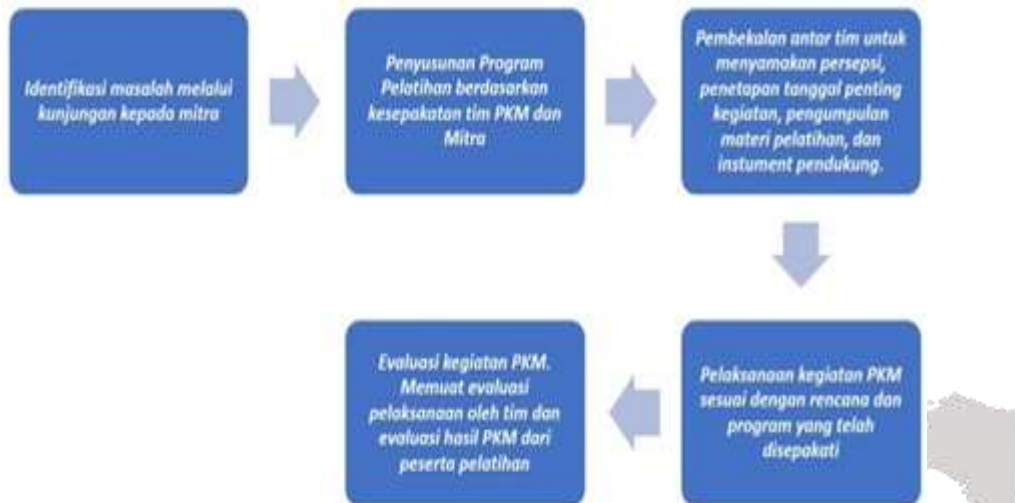
- perlunya penguatan regulasi adat terkait pelaksanaan sasi;
- pelibatan generasi muda dalam kegiatan adat dan pengawasan lingkungan;
- penguatan koordinasi antara pemerintah negeri dan lembaga adat;
- serta peningkatan kesadaran masyarakat terhadap ancaman kerusakan lingkungan pesisir.

Selain itu, masyarakat juga menilai bahwa lemahnya pengawasan terhadap pemanfaatan sumber daya pesisir menjadi salah satu faktor yang dapat mengurangi efektivitas praktik sasi. Oleh karena itu, dalam diskusi berkembang gagasan mengenai pentingnya pembentukan mekanisme pengawasan partisipatif berbasis masyarakat yang melibatkan tokoh adat, pemuda, dan masyarakat pesisir secara langsung.

Secara teoritis, penguatan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sumber daya alam merupakan bagian penting dalam konsep *community based management* yang menekankan keterlibatan masyarakat lokal dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pengelolaan lingkungan. Keterlibatan masyarakat dinilai mampu meningkatkan efektivitas pengawasan sosial dan memperkuat keberlanjutan program pengelolaan sumber daya alam berbasis komunitas. Dalam konteks masyarakat adat pesisir, partisipasi masyarakat juga menjadi instrumen penting dalam menjaga legitimasi sosial terhadap aturan adat yang berlaku.

Temuan kegiatan ini sejalan dengan penelitian terdahulu yang menunjukkan bahwa keberhasilan pengelolaan sumber daya berbasis masyarakat sangat dipengaruhi oleh kekuatan kelembagaan lokal dan tingkat partisipasi masyarakat. Penelitian Wattimena et al. (2024) menunjukkan bahwa kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan lembaga pendamping mampu meningkatkan kapasitas masyarakat pesisir dalam menghadapi tantangan sosial dan ekonomi. Selain itu, penelitian mengenai persepsi masyarakat terhadap pengelolaan sumber daya di Negeri Lima juga menunjukkan bahwa masyarakat cenderung mendukung pengelolaan partisipatif yang melibatkan masyarakat secara langsung dalam proses pengambilan keputusan.

FGD juga menghasilkan kesepakatan awal mengenai perlunya penyusunan mekanisme pengawasan partisipatif berbasis masyarakat dalam menjaga wilayah pesisir. Mekanisme tersebut direncanakan menjadi bagian dari penguatan revitalisasi sasi yang melibatkan pemerintah negeri, tokoh adat, pemuda, dan masyarakat pesisir secara berkelanjutan. Dengan demikian, kegiatan FGD tidak hanya menjadi media diskusi, tetapi juga menjadi sarana membangun komitmen kolektif masyarakat dalam memperkuat ketahanan sosial-ekologis Negeri Lima.



**Gambar 2. Tahapan kegiatan pendampingan dan koordinasi program pengabdian**

### C. Penguatan Kelembagaan Adat dan Pemerintah Negeri

Penguatan kelembagaan adat dan pemerintah negeri menjadi salah satu tahapan penting dalam kegiatan pendampingan revitalisasi sasi di Negeri Lima. Kegiatan ini dilakukan untuk memperkuat sinergi antara pemerintah negeri dan lembaga adat dalam pengelolaan sumber daya pesisir berbasis kearifan lokal. Dalam konteks masyarakat adat pesisir Maluku, keberhasilan implementasi sasi sangat dipengaruhi oleh kekuatan kelembagaan lokal, legitimasi sosial, serta koordinasi antar aktor masyarakat dalam menjalankan fungsi pengawasan dan pengelolaan lingkungan.

Pendampingan kelembagaan dilakukan melalui pendekatan kolaboratif dengan melibatkan pemerintah negeri, tokoh adat, tokoh masyarakat, pemuda, dan kelompok masyarakat pesisir. Kegiatan ini meliputi:

- a) diskusi peran dan fungsi kelembagaan adat;
- b) penguatan koordinasi antar pemangku kepentingan;
- c) penyusunan rekomendasi pengelolaan sumber daya pesisir berbasis sasi;
- d) dan penguatan partisipasi masyarakat.

Kegiatan diskusi kelembagaan difokuskan pada identifikasi peran masing-masing aktor dalam mendukung revitalisasi sasi. Pemerintah negeri diposisikan sebagai unsur administratif yang memiliki kewenangan dalam penguatan regulasi dan fasilitasi program masyarakat, sedangkan lembaga adat memiliki peran dalam menjaga legitimasi sosial, pelaksanaan aturan adat, dan pengawasan terhadap praktik pemanfaatan sumber daya pesisir. Melalui proses diskusi tersebut, masyarakat mulai memahami pentingnya

kolaborasi antara sistem pemerintahan formal dan kelembagaan adat sebagai bagian dari tata kelola pesisir yang berkelanjutan.

Secara teoritis, penguatan kelembagaan lokal merupakan bagian penting dalam konsep *good local governance* yang menekankan pentingnya kolaborasi, partisipasi, dan penguatan kapasitas masyarakat dalam pengelolaan sumber daya alam. Kelembagaan adat yang kuat dapat menjadi instrumen kontrol sosial sekaligus sarana membangun kepatuhan masyarakat terhadap aturan pengelolaan lingkungan berbasis komunitas. Dalam konteks pengelolaan sumber daya pesisir, integrasi antara pemerintah lokal dan kelembagaan adat dinilai mampu meningkatkan efektivitas pengawasan lingkungan dan memperkuat keberlanjutan pengelolaan sumber daya alam.

Hasil pendampingan menunjukkan bahwa masyarakat Negeri Lima masih memiliki kepercayaan yang cukup tinggi terhadap lembaga adat sebagai bagian dari struktur sosial masyarakat. Hal ini terlihat dari tingginya partisipasi masyarakat dalam diskusi mengenai penguatan kembali fungsi-fungsi adat dalam praktik sasi. Keberadaan *baileo* sebagai simbol musyawarah adat juga menjadi ruang penting dalam membangun konsensus dan pengambilan keputusan bersama masyarakat. Selain itu, struktur sosial masyarakat Negeri Lima yang masih berbasis *soa* dan hubungan kekerabatan adat menjadi modal sosial yang mendukung proses penguatan kelembagaan masyarakat.

Dalam pelaksanaan kegiatan, masyarakat menunjukkan antusiasme yang tinggi terutama dalam upaya menghidupkan kembali fungsi-fungsi sosial sasi sebagai bagian dari tata kelola komunitas. Hal ini menunjukkan bahwa revitalisasi sasi tidak hanya dipandang sebagai upaya pelestarian budaya, tetapi juga sebagai strategi mempertahankan keberlanjutan lingkungan dan ketahanan sosial masyarakat pesisir. Masyarakat mulai menyadari bahwa keberlanjutan sumber daya laut dan pesisir tidak dapat dipisahkan dari penguatan nilai-nilai kolektif dan kepatuhan sosial terhadap aturan adat yang berlaku.

Temuan kegiatan ini sejalan dengan hasil penelitian dan pengabdian terdahulu yang menunjukkan bahwa penguatan kelembagaan masyarakat berbasis lokal dapat meningkatkan efektivitas pengelolaan sumber daya alam dan ketahanan komunitas pesisir. Penelitian Wattimena et al. (2024) menunjukkan bahwa kolaborasi antara pemerintah negeri, masyarakat, dan lembaga pendamping mampu memperkuat kapasitas masyarakat pesisir dalam menghadapi tantangan sosial dan ekonomi. Selain itu, penelitian Ruman dan Nanlohy (2025) juga menegaskan bahwa masyarakat Negeri Lima memiliki kecenderungan mendukung pengelolaan sumber daya alam yang bersifat partisipatif dan berbasis keberlanjutan lingkungan.

Melalui kegiatan pendampingan kelembagaan ini, diperoleh rekomendasi awal mengenai pentingnya penyusunan mekanisme koordinasi antara pemerintah negeri dan lembaga adat dalam implementasi sasi, penguatan peran pemuda dalam pengawasan lingkungan, serta pengembangan model tata kelola pesisir berbasis masyarakat yang adaptif terhadap perubahan sosial dan lingkungan. Dengan demikian, penguatan kelembagaan adat dan pemerintah negeri menjadi fondasi penting dalam mendukung keberlanjutan revitalisasi sasi dan penguatan ketahanan sosial-ekologis masyarakat Negeri Lima

#### **D. Hasil Kegiatan Pengabdian**

Hasil kegiatan pengabdian menunjukkan adanya peningkatan pemahaman dan partisipasi masyarakat terhadap pentingnya revitalisasi sasi dalam penguatan ketahanan sosial-ekologis masyarakat Negeri Lima. Peningkatan tersebut terlihat dari keterlibatan aktif masyarakat dalam setiap tahapan kegiatan, mulai dari sosialisasi, diskusi kelompok, hingga proses penyusunan rekomendasi pengelolaan sumber daya pesisir berbasis sasi.

Pendekatan partisipatif yang digunakan dalam kegiatan pengabdian memberikan ruang bagi masyarakat untuk terlibat secara langsung dalam proses identifikasi masalah dan perumusan solusi bersama. Kondisi ini menunjukkan bahwa revitalisasi sasi tidak hanya dipahami sebagai program pelestarian budaya, tetapi juga sebagai kebutuhan masyarakat dalam menjaga keberlanjutan lingkungan dan stabilitas sosial komunitas pesisir.

Beberapa capaian kegiatan yang berhasil diperoleh antara lain sebagai berikut.

### **1. Peningkatan Pemahaman Masyarakat**

Kegiatan sosialisasi dan pendampingan berhasil meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai fungsi dan peran sasi dalam kehidupan sosial masyarakat pesisir. Sebelum kegiatan dilakukan, sebagian masyarakat hanya memahami sasi sebagai tradisi adat yang bersifat seremonial. Namun setelah proses pendampingan, masyarakat mulai memahami kembali bahwa sasi memiliki fungsi yang lebih luas dalam pengelolaan sumber daya alam dan penguatan sistem sosial masyarakat.

Masyarakat mulai memahami kembali fungsi sasi sebagai:

- a) instrumen pengelolaan sumber daya alam;
- b) mekanisme kontrol sosial masyarakat;
- c) media pelestarian nilai budaya lokal;
- d) serta bentuk penguatan solidaritas masyarakat pesisir.

Secara teoritis, peningkatan pemahaman masyarakat merupakan bagian penting dalam proses pemberdayaan masyarakat (*community empowerment*), di mana masyarakat didorong untuk memiliki kesadaran kritis terhadap kondisi sosial dan lingkungan yang dihadapi. Kesadaran tersebut menjadi modal penting dalam membangun partisipasi masyarakat terhadap pengelolaan sumber daya pesisir yang berkelanjutan.

Hasil kegiatan ini menunjukkan bahwa masyarakat Negeri Lima masih memiliki keterikatan yang kuat terhadap nilai-nilai adat dan budaya lokal. Keberadaan baileo, struktur soa, dan hubungan sosial adat menjadi faktor penting yang mendukung proses revitalisasi sasi di tengah perubahan sosial masyarakat.

### **2. Penguatan Kolaborasi Pemerintah Negeri dan Tokoh Adat**

Kegiatan pendampingan berhasil mendorong komunikasi dan koordinasi yang lebih aktif antara pemerintah negeri dan tokoh adat terkait pengelolaan sumber daya pesisir berbasis sasi. Sebelumnya, koordinasi antara unsur pemerintahan dan kelembagaan adat masih bersifat terbatas pada kegiatan adat tertentu. Namun melalui proses pendampingan, kedua pihak mulai membangun kesepahaman mengenai pentingnya kerja sama dalam menjaga keberlanjutan wilayah pesisir.

Penguatan kolaborasi ini terlihat dari keterlibatan aktif pemerintah negeri dalam diskusi penguatan sasi, dukungan terhadap mekanisme pengawasan lingkungan berbasis masyarakat, serta kesediaan tokoh adat untuk kembali menghidupkan fungsi-fungsi sosial sasi dalam kehidupan masyarakat.

Dalam konsep *collaborative governance*, kerja sama antar aktor lokal menjadi faktor penting dalam menciptakan tata kelola sumber daya alam yang efektif dan berkelanjutan. Kolaborasi antara pemerintah negeri dan lembaga adat dinilai mampu memperkuat legitimasi sosial terhadap aturan pengelolaan lingkungan sekaligus meningkatkan kepatuhan masyarakat terhadap kesepakatan bersama.

### **3. Meningkatnya Partisipasi Masyarakat**

Keterlibatan masyarakat dalam diskusi dan kegiatan pengabdian menunjukkan adanya kesadaran kolektif untuk menjaga lingkungan pesisir secara bersama-sama. Masyarakat tidak hanya hadir sebagai peserta kegiatan, tetapi juga aktif menyampaikan pendapat, pengalaman, dan usulan terkait penguatan praktik sasi di Negeri Lima.

Partisipasi masyarakat terlihat dari:

- a) keterlibatan masyarakat dalam FGD;
- b) keterlibatan pemuda dalam diskusi pengawasan lingkungan;
- c) partisipasi kelompok perempuan dalam penyampaian aspirasi terkait keberlanjutan sumber daya pesisir;
- d) serta keterlibatan tokoh masyarakat dalam penyusunan rekomendasi revitalisasi sasi.

Peningkatan partisipasi masyarakat menunjukkan bahwa pendekatan berbasis kearifan lokal mampu menciptakan rasa tanggung jawab kolektif terhadap pelestarian lingkungan. Temuan ini sejalan dengan hasil penelitian terdahulu yang menunjukkan bahwa masyarakat pesisir cenderung lebih aktif terlibat dalam program pengelolaan lingkungan apabila pendekatan yang digunakan sesuai dengan nilai budaya lokal masyarakat (Wattimena et al., 2024).

#### **4. Tersusunnya Rekomendasi Revitalisasi Sasi**

Melalui kegiatan FGD dan pendampingan, diperoleh beberapa rekomendasi awal yang menjadi dasar penguatan revitalisasi sasi di Negeri Lima. Rekomendasi tersebut disusun secara partisipatif berdasarkan hasil diskusi bersama masyarakat, pemerintah negeri, dan tokoh adat.

Beberapa rekomendasi yang dihasilkan antara lain:

- a) penguatan peraturan adat;
- b) pengawasan partisipatif masyarakat;
- c) pelibatan generasi muda;
- d) dan penguatan edukasi lingkungan berbasis budaya lokal.

Selain itu, masyarakat juga merekomendasikan perlunya kegiatan pendampingan lanjutan untuk memastikan implementasi revitalisasi sasi dapat berjalan secara berkelanjutan. Penguatan edukasi lingkungan berbasis budaya lokal dinilai penting untuk meningkatkan kesadaran generasi muda terhadap pentingnya menjaga sumber daya pesisir dan mempertahankan identitas budaya masyarakat Negeri Lima.

Secara keseluruhan, hasil kegiatan pengabdian menunjukkan bahwa revitalisasi sasi memiliki potensi besar sebagai instrumen penguatan ketahanan sosial-ekologis masyarakat pesisir. Revitalisasi sasi tidak hanya berfungsi menjaga keberlanjutan lingkungan, tetapi juga memperkuat solidaritas sosial, partisipasi masyarakat, dan kolaborasi kelembagaan lokal dalam tata kelola wilayah pesisir Negeri Lima

#### **E. Analisis Keberhasilan Kegiatan**

Keberhasilan kegiatan pengabdian diukur berdasarkan tingkat partisipasi masyarakat, keterlibatan pemerintah negeri dan tokoh adat, serta peningkatan pemahaman masyarakat mengenai revitalisasi sasi sebagai instrumen penguatan ketahanan sosial-ekologis masyarakat pesisir. Evaluasi keberhasilan dilakukan melalui observasi lapangan, keterlibatan peserta dalam kegiatan sosialisasi dan FGD, serta hasil diskusi bersama masyarakat dan pemerintah negeri selama proses pendampingan berlangsung.

Secara umum, kegiatan pengabdian menunjukkan hasil yang positif. Hal ini terlihat dari tingginya antusiasme masyarakat dalam mengikuti kegiatan, meningkatnya komunikasi antara pemerintah negeri dan lembaga adat, serta munculnya kesadaran kolektif masyarakat terhadap pentingnya pengelolaan sumber daya pesisir berbasis kearifan lokal. Pendekatan partisipatif yang digunakan dalam kegiatan pengabdian juga mampu membangun keterlibatan aktif masyarakat sejak tahap identifikasi masalah hingga penyusunan rekomendasi program.

**Tabel 1. Capaian hasil kegiatan pengabdian**

| No | Indikator                      | Hasil Kegiatan  |
|----|--------------------------------|---|
| 1  | Partisipasi masyarakat         | Masyarakat aktif mengikuti sosialisasi dan FGD          |
| 2  | Keterlibatan pemerintah negeri | Pemerintah negeri mendukung program revitalisasi sasi   |
| 3  | Keterlibatan tokoh adat        | Tokoh adat terlibat aktif dalam pendampingan            |
| 4  | Pemahaman masyarakat           | Pemahaman masyarakat terhadap fungsi sasi meningkat     |
| 5  | Rekomendasi program            | Tersusun rekomendasi penguatan sasi berbasis masyarakat |

Berdasarkan Tabel 1, tingkat partisipasi masyarakat dalam kegiatan pengabdian tergolong tinggi. Masyarakat tidak hanya hadir sebagai peserta kegiatan, tetapi juga aktif menyampaikan pandangan, pengalaman, dan usulan terkait penguatan praktik sasi di Negeri Lima. Tingginya partisipasi masyarakat menunjukkan bahwa pendekatan berbasis budaya lokal mampu menciptakan rasa memiliki terhadap program pengabdian yang dilaksanakan. Dalam konsep pemberdayaan masyarakat, keterlibatan aktif masyarakat merupakan indikator penting dalam menentukan keberhasilan suatu program pengabdian karena masyarakat menjadi bagian dari proses perubahan sosial yang terjadi.

Keberhasilan kegiatan juga terlihat dari dukungan pemerintah negeri terhadap program revitalisasi sasi. Pemerintah negeri menunjukkan komitmen untuk memperkuat koordinasi dengan tokoh adat dan masyarakat dalam pengelolaan sumber daya pesisir berbasis sasi. Dukungan tersebut menjadi faktor penting dalam menciptakan tata kelola sumber daya pesisir yang kolaboratif dan berkelanjutan. Selain itu, tokoh adat juga terlibat aktif dalam proses pendampingan melalui penyampaian nilai-nilai adat, penguatan legitimasi sosial sasi, serta partisipasi dalam penyusunan rekomendasi penguatan kelembagaan adat.

Peningkatan pemahaman masyarakat terhadap fungsi sasi menjadi salah satu capaian utama kegiatan pengabdian ini. Masyarakat mulai memahami bahwa sasi tidak hanya berfungsi sebagai tradisi budaya, tetapi juga sebagai instrumen pengelolaan sumber daya alam, mekanisme kontrol sosial, dan sarana penguatan solidaritas masyarakat pesisir. Peningkatan pemahaman tersebut terlihat dari hasil diskusi masyarakat yang mulai menghubungkan keberlanjutan lingkungan pesisir dengan penguatan kembali praktik sasi dalam kehidupan sosial masyarakat.

Selain itu, kegiatan pengabdian berhasil menghasilkan rekomendasi awal penguatan revitalisasi sasi berbasis masyarakat. Rekomendasi tersebut meliputi penguatan aturan adat, pengawasan partisipatif masyarakat, pelibatan generasi muda, dan penguatan edukasi lingkungan berbasis budaya lokal. Rekomendasi ini menjadi dasar awal bagi pemerintah negeri dan lembaga adat dalam menyusun langkah tindak lanjut pengelolaan sumber daya pesisir berbasis sasi di Negeri Lima.

Hasil kegiatan ini memiliki keunggulan dibandingkan kegiatan sejenis karena tidak hanya berfokus pada aspek pelestarian budaya, tetapi juga mengintegrasikan aspek ketahanan sosial dan ekologis masyarakat pesisir. Pendekatan yang digunakan tidak menempatkan masyarakat hanya sebagai objek kegiatan, melainkan sebagai subjek utama dalam proses revitalisasi sasi. Selain itu, kegiatan ini juga menghubungkan penguatan kelembagaan adat dengan tata kelola pemerintahan negeri sehingga tercipta model pengelolaan pesisir yang lebih partisipatif dan kontekstual dengan kondisi masyarakat lokal.

Temuan ini sejalan dengan penelitian terdahulu yang menunjukkan bahwa penguatan kelembagaan lokal dan partisipasi masyarakat merupakan faktor penting dalam keberhasilan pengelolaan sumber daya alam berbasis komunitas. Penelitian Wattimena et al. (2024) menunjukkan bahwa keterlibatan masyarakat dan kolaborasi antar pemangku kepentingan mampu meningkatkan kapasitas masyarakat pesisir dalam menghadapi tantangan sosial dan ekonomi. Selain itu, penelitian mengenai persepsi masyarakat Negeri

Lima terhadap pengelolaan sumber daya alam juga menunjukkan bahwa masyarakat mendukung model pengelolaan yang bersifat partisipatif dan berkelanjutan.

Namun demikian, kegiatan ini masih memiliki beberapa keterbatasan, seperti:

- a) keterbatasan waktu pendampingan;
- b) belum adanya regulasi formal terkait implementasi sasi;
- c) dan perlunya pendampingan berkelanjutan agar hasil kegiatan dapat diterapkan secara optimal.

Keterbatasan waktu pendampingan menyebabkan proses penguatan kelembagaan dan implementasi rekomendasi revitalisasi sasi belum dapat dilakukan secara menyeluruh. Selain itu, belum adanya regulasi formal yang mengatur implementasi sasi menjadi tantangan dalam memastikan keberlanjutan program pengelolaan sumber daya pesisir berbasis adat. Oleh karena itu, diperlukan pendampingan lanjutan serta dukungan kebijakan dari pemerintah negeri dan pemangku kepentingan lainnya agar revitalisasi sasi dapat berjalan secara berkelanjutan dan memberikan dampak yang lebih luas bagi penguatan ketahanan sosial-ekologis masyarakat Negeri Lima.

#### **F. Dampak Kegiatan terhadap Ketahanan Sosial-Ekologis**

Kegiatan pengabdian yang dilaksanakan di Negeri Lima memberikan dampak positif terhadap penguatan ketahanan sosial-ekologis masyarakat pesisir. Dampak tersebut terlihat dari meningkatnya kesadaran masyarakat mengenai pentingnya menjaga keseimbangan antara keberlanjutan lingkungan pesisir dan penguatan hubungan sosial masyarakat berbasis nilai-nilai adat lokal. Revitalisasi sasi tidak hanya dipahami sebagai upaya menghidupkan kembali tradisi budaya, tetapi juga sebagai strategi sosial dalam menghadapi perubahan lingkungan, tekanan ekonomi masyarakat pesisir, dan melemahnya solidaritas sosial akibat perubahan sosial masyarakat.

Dalam konsep ketahanan sosial-ekologis (*social-ecological resilience*), suatu masyarakat dinilai memiliki ketahanan yang baik apabila mampu mempertahankan fungsi sosial, budaya, dan ekologisnya dalam menghadapi gangguan atau perubahan lingkungan. Ketahanan tersebut dibangun melalui kemampuan masyarakat dalam beradaptasi, menjaga solidaritas sosial, dan mempertahankan sistem pengelolaan sumber daya yang berkelanjutan. Dalam konteks masyarakat Negeri Lima, revitalisasi sasi menjadi salah satu instrumen penting dalam memperkuat kapasitas adaptif masyarakat terhadap berbagai ancaman lingkungan pesisir.

Hasil kegiatan menunjukkan bahwa revitalisasi sasi mampu memperkuat:

- a) solidaritas sosial masyarakat;
- b) kesadaran kolektif terhadap pelestarian lingkungan;
- c) hubungan antara pemerintah negeri dan masyarakat adat;
- d) serta partisipasi masyarakat dalam pengelolaan wilayah pesisir.

Penguatan solidaritas sosial terlihat dari meningkatnya interaksi dan kerja sama masyarakat dalam kegiatan diskusi, sosialisasi, dan penyusunan rekomendasi revitalisasi sasi. Masyarakat mulai membangun kembali kesadaran bahwa pengelolaan sumber daya pesisir merupakan tanggung jawab bersama yang membutuhkan keterlibatan seluruh unsur masyarakat. Nilai-nilai kolektif seperti gotong royong, musyawarah adat, dan kepedulian terhadap lingkungan mulai kembali diperkuat melalui proses pendampingan yang dilakukan.

Selain itu, kegiatan pengabdian juga berhasil meningkatkan kesadaran kolektif masyarakat terhadap pentingnya pelestarian lingkungan pesisir. Masyarakat mulai memahami bahwa kerusakan lingkungan laut dan pesisir dapat berdampak langsung terhadap kehidupan ekonomi dan sosial masyarakat yang sebagian

besar bergantung pada sektor perikanan dan sumber daya alam pesisir. Kesadaran tersebut mendorong munculnya komitmen bersama untuk mendukung penguatan kembali praktik sasi sebagai mekanisme perlindungan lingkungan berbasis masyarakat.

Dampak lain yang cukup signifikan adalah membaiknya hubungan dan koordinasi antara pemerintah negeri dan masyarakat adat dalam pengelolaan sumber daya pesisir. Sebelum kegiatan dilakukan, koordinasi antar kelembagaan masih bersifat terbatas dan belum terintegrasi secara optimal. Namun melalui proses pendampingan dan diskusi partisipatif, mulai terbentuk komunikasi yang lebih aktif antara pemerintah negeri, tokoh adat, dan masyarakat dalam membahas penguatan tata kelola wilayah pesisir berbasis sasi.

Kegiatan ini juga memberikan dampak terhadap meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pengelolaan wilayah pesisir. Partisipasi masyarakat terlihat dari keterlibatan aktif masyarakat dalam proses diskusi, penyampaian aspirasi, serta penyusunan rekomendasi penguatan sasi. Keterlibatan generasi muda dan kelompok perempuan dalam kegiatan pengabdian menunjukkan bahwa revitalisasi sasi mulai dipahami sebagai tanggung jawab bersama lintas kelompok masyarakat.

Temuan kegiatan ini sejalan dengan hasil penelitian terdahulu yang menunjukkan bahwa penguatan kelembagaan lokal dan partisipasi masyarakat memiliki pengaruh besar terhadap keberhasilan pengelolaan sumber daya alam berbasis komunitas. Penelitian Wattimena et al. (2024) menunjukkan bahwa pendekatan pemberdayaan masyarakat berbasis partisipasi mampu meningkatkan kapasitas sosial masyarakat pesisir dalam menghadapi tantangan perubahan lingkungan dan ekonomi. Selain itu, penelitian mengenai persepsi masyarakat Negeri Lima terhadap pengelolaan sumber daya alam juga menunjukkan bahwa masyarakat cenderung mendukung model pengelolaan yang bersifat partisipatif dan berorientasi pada keberlanjutan lingkungan.

Keberadaan baileo sebagai ruang musyawarah adat juga memberikan kontribusi penting dalam memperkuat ketahanan sosial masyarakat. Baileo tidak hanya berfungsi sebagai simbol budaya, tetapi juga menjadi ruang kolektif masyarakat dalam membangun konsensus dan memperkuat nilai-nilai kebersamaan masyarakat Negeri Lima. Dengan demikian, revitalisasi sasi menjadi bagian dari penguatan sistem sosial masyarakat adat yang memiliki hubungan erat dengan keberlanjutan lingkungan pesisir.

Selain itu, kegiatan ini menjadi langkah awal dalam membangun model tata kelola pesisir berbasis kearifan lokal yang berkelanjutan dan adaptif terhadap perubahan sosial maupun ancaman lingkungan di wilayah pesisir Negeri Lima. Model tata kelola tersebut menempatkan masyarakat adat, pemerintah negeri, dan masyarakat pesisir sebagai aktor utama dalam proses pengelolaan sumber daya alam berbasis partisipasi dan nilai budaya lokal. Pendekatan ini diharapkan mampu menjadi dasar pengembangan program pengelolaan pesisir berkelanjutan yang dapat diterapkan tidak hanya di Negeri Lima, tetapi juga di wilayah pesisir lainnya di Maluku

## **KESIMPULAN**

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dengan tema *Pendampingan Revitalisasi Sasi sebagai Upaya Penguatan Ketahanan Sosial-Ekologis di Negeri Lima* telah dilaksanakan melalui pendekatan partisipatif dengan melibatkan pemerintah negeri, tokoh adat, pemuda, kelompok masyarakat, dan masyarakat pesisir. Kegiatan pengabdian berhasil mencapai tujuan utama yaitu meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai pentingnya revitalisasi sasi sebagai instrumen pengelolaan sumber daya pesisir berbasis kearifan lokal sekaligus memperkuat ketahanan sosial-ekologis masyarakat Negeri Lima.

Hasil kegiatan menunjukkan adanya peningkatan partisipasi masyarakat dalam kegiatan sosialisasi, *Focus Group Discussion* (FGD), dan pendampingan kelembagaan adat. Masyarakat mulai memahami kembali fungsi sasi tidak hanya sebagai tradisi budaya, tetapi juga sebagai mekanisme kontrol sosial, penguatan solidaritas masyarakat, dan instrumen pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan. Keberhasilan program juga terlihat dari meningkatnya komunikasi dan koordinasi antara pemerintah negeri dan tokoh adat dalam penguatan tata kelola wilayah pesisir berbasis sasi.

Secara terukur, tingkat keberhasilan kegiatan dapat dilihat dari:

1. Tingginya keterlibatan masyarakat dalam seluruh tahapan kegiatan pengabdian;
2. Keterlibatan aktif pemerintah negeri dan tokoh adat dalam proses pendampingan;
3. Meningkatnya pemahaman masyarakat terhadap fungsi sosial dan ekologis sasi;
4. Tersusunnya rekomendasi awal penguatan revitalisasi sasi berbasis partisipasi masyarakat;
5. Meningkatnya kesadaran kolektif masyarakat terhadap pentingnya pelestarian lingkungan pesisir.

Selain itu, kegiatan pengabdian berhasil menghasilkan rekomendasi penguatan revitalisasi sasi yang meliputi penguatan regulasi adat, pengawasan partisipatif masyarakat, pelibatan generasi muda, dan penguatan edukasi lingkungan berbasis budaya lokal. Hasil tersebut menunjukkan bahwa revitalisasi sasi memiliki potensi besar sebagai model pengelolaan wilayah pesisir berbasis kearifan lokal yang adaptif terhadap perubahan sosial dan ancaman lingkungan.

Meskipun demikian, kegiatan ini masih memiliki keterbatasan terutama pada aspek waktu pendampingan dan belum adanya regulasi formal yang mendukung implementasi sasi secara berkelanjutan. Oleh karena itu, diperlukan pendampingan lanjutan serta dukungan kebijakan dari pemerintah negeri dan pemangku kepentingan lainnya agar revitalisasi sasi dapat diimplementasikan secara lebih optimal dan berkelanjutan.

Adapun saran untuk kegiatan pengabdian selanjutnya adalah:

1. Perlunya penyusunan regulasi atau peraturan negeri terkait implementasi sasi;
2. Penguatan pelibatan generasi muda dalam pengawasan dan pelestarian wilayah pesisir;
3. Pengembangan program edukasi lingkungan berbasis budaya lokal;
4. Pendampingan berkelanjutan terhadap kelembagaan adat dan pemerintah negeri;
5. Pengembangan model pengelolaan pesisir berbasis sasi yang dapat direplikasi di wilayah pesisir lainnya di Maluku.

## **UCAPAN TERIMAKASIH**

Ucapan terimakasih disampaikan kepada Pemerintah Negeri Lima, tokoh adat, tokoh masyarakat, pemuda, dan seluruh masyarakat Negeri Lima yang telah mendukung dan berpartisipasi aktif dalam pelaksanaan kegiatan pengabdian ini. Terimakasih juga disampaikan kepada institusi pelaksana pengabdian yang telah memberikan dukungan moral, akademik, dan administratif sehingga kegiatan ini dapat terlaksana dengan baik.

Penghargaan dan apresiasi juga diberikan kepada seluruh pihak yang telah membantu proses pelaksanaan kegiatan, baik dalam tahap observasi, sosialisasi, pendampingan, maupun evaluasi program pengabdian masyarakat di Negeri Lima, Kabupaten Maluku Tengah.

## DAFTAR PUSTAKA

- Aini, N., Wahyuni, S., & Rahmawati, D. (2021). Pemberdayaan perempuan dalam penguatan ekonomi masyarakat pesisir berbasis UMKM. *Jurnal Pemberdayaan Masyarakat*, 6(2), 112–124. <https://doi.org/10.37064/jpm.v6i2.1121>
- Cai, C., Jiao, X., & Zhang, L. (2019). Women empowerment and sustainable rural development in coastal communities. *Sustainability*, 11(12), 3435. <https://doi.org/10.3390/su11123435>
- Dabissa, A. (2013). Community participation and local empowerment in natural resource management. *International Journal of Sociology and Anthropology*, 5(4), 123–131. <https://doi.org/10.5897/IJSA12.145>
- Dewi, R. K. (2020). Persepsi masyarakat terhadap pelestarian danau berbasis kearifan lokal di Bali. *Jurnal Lingkungan dan Pembangunan*, 4(1), 45–57. <https://doi.org/10.22225/jlp.4.1.2020.45-57>
- Ghimire, S., Khatri, S., & Sharma, P. (2024). Women access and community empowerment in sustainable coastal development. *Journal of Community Development Research*, 17(1), 22–35. <https://doi.org/10.14456/jcdr.2024.3>
- Green, G. P., & Brock, T. (2005). Organizational development and community participation. *Community Development Journal*, 40(3), 273–284. <https://doi.org/10.1093/cdj/bsi040>
- Kuntarta, A. (2020). Indikator pemberdayaan perempuan dalam pembangunan masyarakat pesisir. *Jurnal Sosial Humaniora*, 13(2), 98–107. <https://doi.org/10.12962/j24433527.v13i2.6542>
- Mahmudah, S., & Yasin, M. (2022). Strategi pemberdayaan masyarakat dalam penguatan ekonomi berbasis lokal. *Jurnal Pengabdian dan Pemberdayaan Masyarakat*, 6(1), 34–44. <https://doi.org/10.30595/jppm.v6i1.11829>
- Marthalina, M. (2018). Pemberdayaan perempuan dalam mendukung usaha mikro kecil dan menengah di Indonesia. *Jurnal Pembangunan Pemberdayaan Pemerintahan*, 3(1), 59–76. <https://doi.org/10.33701/j-3p.v3i1.862>
- Purwaningsih, E., & Kusuma, A. (2021). Pendekatan kualitatif dalam penelitian pemberdayaan masyarakat. *Jurnal Penelitian Sosial dan Humaniora*, 10(1), 1–10. <https://doi.org/10.24198/jpsh.v10i1.28612>
- Ribot, J. C., & Peluso, N. L. (2003). A theory of access. *Rural Sociology*, 68(2), 153–181. <https://doi.org/10.1111/j.1549-0831.2003.tb00133.x>
- Ronsumbre, A., & Ihsanuddin, I. (2021). Persepsi masyarakat terhadap pengelolaan sumber daya alam berbasis komunitas di wilayah pesisir. *Jurnal Ilmu Lingkungan*, 19(3), 420–431. <https://doi.org/10.14710/jil.19.3.420-431>
- Ruman, R., & Nanlohy, W. D. (2025). Persepsi masyarakat terhadap keberadaan DAM Wae Ela di Desa Negeri Lima Kabupaten Maluku Tengah. *KNOWLEDGE: Jurnal Inovasi Hasil Penelitian dan Pengembangan*, 5(2), 342–348. <https://jurnalp4i.com/index.php/knowledge/article/view/20296>
- Sahra Korpi, T., & Bandi, M. (2021). Access and empowerment in community-based economic development. *Development in Practice*, 31(5), 623–635. <https://doi.org/10.1080/09614524.2021.1908314>
- Sayektiningsih, T., & Hayati, A. (2021). Pengelolaan sumber daya air berbasis masyarakat dan keberlanjutan lingkungan. *Jurnal Wilayah dan Lingkungan*, 9(2), 119–130. <https://doi.org/10.14710/jwl.9.2.119-130>
- Silalahi, M., Harahap, R., & Simanjuntak, D. (2021). Dukungan masyarakat terhadap pengelolaan sumber daya berbasis lokal di kawasan pesisir. *Jurnal Pengelolaan Sumberdaya Alam dan Lingkungan*, 11(4), 580–592. <https://doi.org/10.29244/jpsl.11.4.580-592>

- Thaddeus, P., Ibrahim, M., & Yusuf, H. (2022). Women entrepreneurship and sustainable community development in coastal areas. *International Journal of Social Economics*, 49(8), 1165–1181. <https://doi.org/10.1108/IJSE-09-2021-0552>
- Wattimena, F. A., Nurhaeny, A., & Aswad, W. O. S. J. (2024). Strategi pengembangan pemberdayaan perempuan dalam mendukung usaha kecil di desa pesisir (Studi kasus: Negeri Lima, Kecamatan Leihitu, Kabupaten Maluku Tengah). *Jurnal Pemberdayaan Masyarakat*, 12(1), 26–39. <https://doi.org/10.37064/jpm.v12i1.20296>
- Wiejaczka, Ł., Piróg, D., & Fidelus-Orzechowska, J. (2018). Social perception of dam development and environmental sustainability. *Sustainability*, 10(11), 4109. <https://doi.org/10.3390/su10114109>

